

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Pmk*, 2–16.
- Menteri keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI*. 3, 1–72.
- Mirza Avicenna Asyifyan. (2022). *Prosedur Dokumentasi Surat Perintah Membayar (SPM) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharann Negara Semarang 1. 8.5.2017*, 2003–2005.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 1–23.